

Thin Capitalization dan Koneksi Politik dalam Mendorong Agresivitas Pajak yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional

Azzahra Fayza Nabila, Aditya Hermawan

Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

azzahra.fayzaaaa@gmail.com, adityahermawan82@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by data indicating that energy sector companies in Indonesia rank 11th among 30 countries with the lowest tax compliance rates. Using a quantitative approach, this research investigates the factors influencing tax avoidance behavior in the energy sector. Moderated Regression Analysis (MRA) was applied to data from 48 IDX-listed energy companies, selected based on the Job Training specific criteria and analyzed using Eviews version 12. The result reveals that political connections significantly affect tax aggressiveness. However, this effect weakens when moderated by institutional ownership, which shows a significant but negative interaction. In contrast, thin capitalization and its interaction with the moderating variable do not exhibit any significant influence.

Keywords: *Thin Capitalization; Political Connection; Tax Aggressiveness; Institutional Ownership*

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh data yang menunjukkan bahwa perusahaan sektor *energy* di Indonesia berada di posisi ke-11 dari 30 negara dengan tingkat kepatuhan pajak rendah. Penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang mempengaruhi penghindaran pajak di sektor *energy* menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dengan sampel 48 perusahaan sektor *energy* tahun 2021-2023 di BEI yang diperoleh berdasarkan kriteria tertentu dan diolah menggunakan perangkat lunak *Eviews* versi 12. Hasilnya menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara interaksi koneksi politik dan kepemilikan institusional sebagai moderasi juga signifikan namun dengan arah negatif. Sebaliknya, *thin capitalization* dan interaksinya dengan moderasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Kata kunci: *Thin Capitalization; Koneksi Politik; Agresivitas Pajak; Kepemilikan Institusional*

PENDAHULUAN

Pajak adalah dasar penerimaan terbesar negara dan sangat penting dalam APBN (Amaliyah & Nurdin, 2024). Data Kementerian Keuangan RI (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, penerimaan pajak menjadi kontributor utama dalam APBN. Dari total pendapatan negara Rp 1.743,6 triliun, pemerintah menargetkan Rp 1.444,5 triliun berasal dari sektor perpajakan (Hasyim et al., 2022). Perusahaan dan pemerintah memiliki persepsi berbeda tentang pajak. Pajak disebut oleh perusahaan sebagai beban yang menyebabkan berkurangnya laba bersih, sehingga perusahaan berupaya meminimalkannya. Sementara pemerintah, melihat pajak sebagai sumber pendapatan negara dan berusaha meningkatkannya. Perbedaan ini mendorong perusahaan mengurangi beban pajak dengan

melaksanakan perancangan pajak, yang dikenal sebagai agresivitas pajak (Riswandari & Bagaskara, 2020).

Agresivitas pajak merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi atau menghindari beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum secara eksplisit. Praktik ini umumnya dilakukan dengan cara legal, pemerintah tidak mendukung praktik ini karena bertentangan dengan tujuan pengumpulan pajak yang optimal (Sunarana & Hermawan, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Julianti & Ruslim (2023) menegaskan bahwa agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat berdampak negatif terhadap potensi penerimaan pajak negara.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) merupakan salah satu perusahaan yang diketahui melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan laporan *Global Witness* yang dirilis pada Juli 2019 berjudul *Taxing Times for Adaro*, perusahaan ini diduga mengalihkan laba melalui perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Service International*. Transaksi tersebut diperkirakan telah berlangsung sejak 2009 hingga 2019, dengan potensi kerugian negara mencapai USD 14 juta per tahun. Kasus serupa juga melibatkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Pada Juni 2021, mengubah kode impornya untuk menghindari pajak atas transaksi emas senilai Rp47,1 triliun (Nurfalah et al., 2024).

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menunjukkan keterlibatan dalam kasus agresivitas pajak di sektor *energy*. Perusahaan ini diwajibkan membayar pajak terutang sebesar Rp 3,06 triliun kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP), termasuk denda, karena dituduh melakukan praktik penghindaran pajak dengan adanya perbedaan interpretasi mengenai ketentuan pajaknya, khususnya terkait kewajiban pemungutan pajak atas penyerahan gas bumi. Perbedaan pemahaman ini mengakibatkan konflik antara PGAS dengan otoritas perpajakan (kompas.com). Perusahaan melihat pajak sebagai biaya yang mereduksi keuntungan, sehingga mereka berupaya untuk membayar serendah mungkin (Kurniawati & Mukti, 2023). Penerimaan pajak dari sektor *energy* memiliki peran penting dalam pendapatan negara. Bahkan, sektor ini sering menjadi target utama penerimaan negara yang diprioritaskan DJP (ideatax.id). Sektor *energy* Indonesia juga menghadapi tantangan yang mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Pada tahun 2023, penurunan saham 10,02% akibat harga minyak yang turun dan pelemahan ekonomi China mendorong perusahaan *energy* untuk lebih mengoptimalkan penghindaran pajak. Mengingat Indonesia adalah penghasil nikel terbesar, penghindaran pajak di sektor ini berpotensi mengurangi penerimaan negara (Reichl & Schatz, 2021).

Strategi *thin capitalization* diterapkan sebagai upaya pengurangan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak yang ada. Perbedaan tersebut terletak pada pengakuan pembayaran bunga sebagai pengurang pajak, berbeda dengan pembagian dividen kepada pemegang saham yang tidak dapat mengurangi beban pajak (Cahyani et al., 2021). Ketentuan mengenai *thin capitalization* di Indonesia diatur dalam undang-undang, khususnya terkait rasio utang dan modal yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak

Penghasilan. Dalam pasal tersebut, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan batasan perbandingan antara utang dan modal yang diperbolehkan untuk keperluan perhitungan pajak (Sumekar et al., 2023).

Afiliasi politik dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Perusahaan dengan koneksi politik cenderung memiliki *leverage* yang lebih besar, kewajiban pajak yang kecil, serta kpotensi pasar yang lebih dominan (Satiti et al., 2021). Menurut Devriadi & Achyani (2023), salah satu penyebab agresivitas pajak adalah jaringan politik. Perusahaan dengan koneksi politik cenderung mengurangi risiko bisnis dan memiliki keunggulan pasar (Pramesti & Laili, 2024).

Penelitian Aysha & Sari (2022) menjelaskan bahwa koneksi politik mempengaruhi agresivitas pajak melalui beberapa cara: memberikan perlindungan bisnis, akses ke data untuk perencanaan pajak canggih, mengurangi tekanan pasar untuk transparansi, meredam dampak politik dari strategi pajak agresif, dan meningkatkan keberanian mengambil risiko yang berhubungan dengan agresivitas pajak yang lebih tinggi.

Tingkat kepemilikan oleh lembaga institusional diyakini menjadi salah satu penentu dalam praktik agresivitas pajak (Olivia Lucky & Murtanto, 2022). Proposi saham yang dipegang oleh institusi pada akhir periode tertentu mencerminkan variabel kepemilikan institusional. Keberadaan institusional tersebut dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengawasi keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajer. Pengawasan terhadap manajemen dapat dioptimalkan melalui peran aktif investor institusional. Kehadiran investor institusional mampu mengawasi secara efektif setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Sebagai komponen penting dalam tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional diharapkan dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pendanaan melalui hutang dan ekuitas pemegang saham (Ayuningtia & Pramiana, 2024).

TINJAUAN LITERATUR

Teori Stakeholder

Kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif teori stakeholder untuk menganalisis pajak, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Teori ini menekankan pentingnya manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. R. Edward Freeman dalam bukunya yang terbit pada tahun 1984 dengan judul *Strategic Management: A Stakeholder Approach* mengenalkan tentang teori stakeholder. Teori Stakeholder mengulas pandangan kapitalisme yang menyoroti interaksi antara bisnis dan berbagai pihak terkait, seperti pelanggan, karyawan, investor, mitra, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya dalam organisasi. Pandangan ini juga menegaskan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai elemen yang berkontribusi pada keberlangsungan bisnis (Fasita et al., 2022).

Agresivitas Pajak

Penjelasan mengenai agresivitas pajak menurut (Lestari Yuli Prastyatini & Yesti Trivita, 2022) merujuk pada definisi (Rusli, 2021) yang menyebutkannya sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan untuk meminimalkan strategi perencanaan pajak. Perencanaan tersebut dapat dilakukan melalui metode yang dianggap legal yaitu melalui penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* maupun yang dianggap ilegal yaitu penggelapan pajak atau *Tax Evasion*. Temuan (Hasmawati, Wuri Handayani, 2020) juga menyimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah usaha untuk mengurangi pembayaran pajak dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui laba setelah penerapan perencanaan pajak yang optimal. Penelitian (Mohammad Aryo, 2020) memanfaatkan Effective Tax Rate (ETR) sebagai indikator untuk menilai tingkat agresivitas pajak, yang merupakan proksi paling umum digunakan dalam literatur untuk mengukur agresivitas pajak. ETR menggambarkan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal

Thin Capitalization

Thin Capitalization adalah strategi pendanaan operasi bisnis di mana perusahaan lebih menitikberatkan pendanaan melalui proporsi utang daripada modal sendiri dalam komposisi modalnya. Menurut (Olivia Lucky & Murtanto, 2022) *Thin capitalization* adalah praktik di mana struktur utang perusahaan jauh lebih besar dibandingkan dengan modal ekuitas. Saat jumlah pinjaman meningkat, beban bunga juga bertambah dan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Dalam penelitian ini, *thin capitalization* diukur dengan membandingkan total kewajiban dengan ekuitas (Arifah & Ariefiara, 2021).

Koneksi Politik

Skala dummy digunakan sebagai alat untuk mengukur koneksi politik, skala ini menyatakan jika terdapat koneksi politik dalam perusahaan tersebut maka akan dinilai dengan 1. Sebaliknya, jika tidak terdapat koneksi politik dalam perusahaan maka akan dinilai dengan 0. Penelitian ini menggunakan kriteria yang diadaptasi oleh (Aysha & Sari, 2022), dan mencakup beberapa ciri:

1. Salah satu posisi direktur atau komisaris ditempati oleh individu yang juga menduduki peran sebagai anggota dewan, anggota kabinet, aparatur negara, atau anggota partai politik, termasuk personel militer.
2. Direktur atau komisaris yang pernah mengemban tugas sebagai anggota dewan, anggota kabinet, atau aparatur negara, termasuk personel militer, turut hadir dalam struktur kepemimpinan.

Kepemilikan Institusional

Institusi pada akhir periode yang memegang persentase saham disebut dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan ini dianggap sangat penting dalam diminimalkan konflik kepentingan antara pengelola dan pemilik saham (Olivia Lucky & Murtanto, 2022). Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme tata

kelola perusahaan oleh pihak eksternal yang berpotensi mengurangi konflik keagenan melalui kegiatan pengawasan. Kepemilikan ini adalah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi keuangan dan nonkeuangan lainnya. Berdasarkan pengukuran oleh (Prastiwi & Walidah, 2020), institusi yang memiliki saham dengan total saham yang beredar akan dibandingkan jumlahnya untuk mengukur kepemilikan institusional.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak sering kali dipicu oleh praktik *thin capitalization*. Praktik ini melibatkan pengelolaan struktur pendanaan perusahaan dengan lebih banyak mengandalkan utang. Praktik *thin capitalization* dapat memicu konflik kepentingan dalam perspektif teori stakeholder. Pemegang saham cenderung mendukung penghematan pajak untuk meningkatkan laba, sementara pemerintah, sebagai pemangku kepentingan utama, berupaya memaksimalkan penerimaan pajak guna mendanai kebutuhan publik. Beban bunga yang timbul dari liabilitas tersebut dimanfaatkan sebagai pengurang pajak karena diklasifikasikan sebagai *deductible expenses* (Mayangsari et al., 2024). Sejalan dengan (Hermi & Petrawati, 2023; Nadhifah & Arif, 2020; Utami & Irawan, 2022). Sehingga diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ *Thin Capitalization* Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Koneksi politik berkontribusi terhadap penghindaran pajak, dipengaruhi oleh korupsi tinggi, kontrol politik atas ekonomi, dan pengaruh perusahaan dalam melindungi diri dari pemeriksaan pajak (Fasita et al., 2022) dan menurut (Rudyanto et al., 2023) dalam konteks teori stakeholder perusahaan dengan koneksi politik dapat memanfaatkan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan dalam regulasi pajak. Hal ini berisiko mengabaikan kepentingan stakeholder lain, seperti masyarakat dan regulator, yang mengharapkan kontribusi pajak yang lain. Perusahaan tersebut dapat menjalankan perencanaan pajak yang lebih agresif karena memiliki kebutuhan yang lebih rendah akan legitimasi dari para pemangku kepentingan. Bertetangan dengan (Sumingtio et al., 2022) menunjukkan bahwa komisaris dan direksi yang memiliki koneksi politik justru cenderung lebih konservatif dalam praktik agresivitas pajak. Namun, penelitian Lihdya Sari et al., (2022); Solikin & Slamet, (2022) membuktikan bahwa koneksi politik dapat mendorong peningkatan agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ Koneksi Politik Berpengaruh signifikan Terhadap Agresivitas Pajak.

Kepemilikan Institusional Memoderasi *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional, dalam perspektif teori stakeholder, berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Pemilik saham cenderung mendorong transparansi dan menghindari praktik agresivitas pajak yang dapat merusak reputasi atau memicu risiko hukum. Kepemilikan institusional dianggap sebagai kunci mengawasi secara efektif keputusan manajerial terkait penghindaran pajak guna mengurangi konflik kepentingan dan memantau aktivitas para manajer (Alkurdi & Mardini, 2020). Penelitian Prastiwi & Ratnasari (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan yang tingkat *thin capitalization* tinggi dalam struktur keuangannya cenderung melakukan agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian (Rahmadhani & Lastanti, 2024; Widadi et al., 2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₃ Kepemilikan institusional memoderasi *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak.

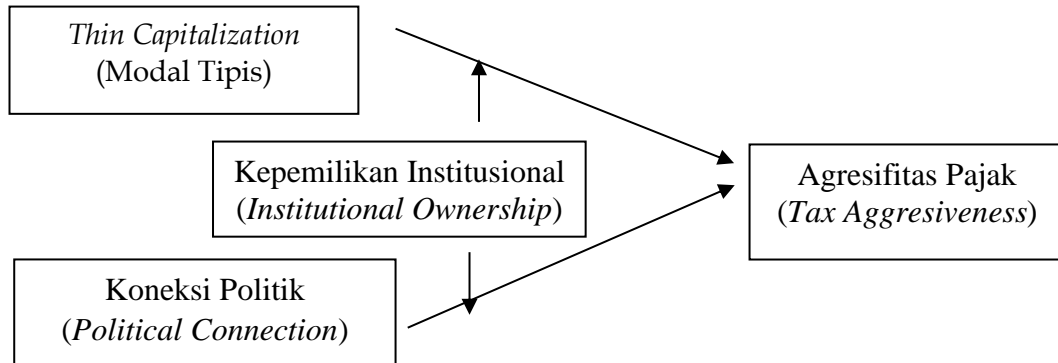
Kepemilikan Institusional memoderasi Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Pemegang saham institusional cenderung menghindari risiko agresivitas pajak, sehingga pengawasan mereka dapat melemahkan dampak koneksi politik terhadap penghindaran pajak (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Koneksi politik membantu perusahaan mengakses perubahan kebijakan pajak, merencanakan antisipasi tarif baru, dan mengurangi tekanan regulasi, yang meningkatkan agresivitas pajak (Putra & Suhardianto, 2020). Penelitian (Amaliyah & Nurdin, 2024; Firmansyah et al., 2022) menunjukkan kepemilikan institusional melemahkan pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Dalam teori stakeholder, kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme kontrol yang membatasi tindakan manajemen yang berisiko merugikan stakeholder. Dalam perusahaan dengan koneksi politik kuat, kepemilikan institusional membantu menyeimbangkan kepentingan pemegang saham, regulator, dan masyarakat, sehingga dapat menekan agresivitas pajak. Dengan demikian, merujuk pada teori dan penelitian yang telah ada, hipotesis yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut:

H₄ Kepemilikan Institusional memoderasi Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 1. Kerangka Konseptual Sumber Penulis



METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) sebagai metode. Data yang digunakan didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website perusahaan sampel dengan mengambil laporan keuangan dan laporan tahunan yang kemudian digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Semua perusahaan sektor energi yang masuk dalam daftar Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023 adalah populasi dalam penelitian ini. *Purposive Sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel, sehingga didapatkan 48 perusahaan yang memenuhi syarat, sehingga total observasi dalam penelitian ini mencapai 111 dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	Total
1.	Perusahaan Sektor <i>Energy</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021 s.d 2023.	87
2.	Perusahaan Sektor <i>Energy</i> yang tidak menerbitkan Laporan Tahunan secara berturut-turut pada periode 2021 s.d 2023.	(15)
3.	Perusahaan Sektor <i>Energy</i> yang menyatakan rugi secara berturut-turut pada periode 2021 s.d 2023.	(24)
	Jumlah Sampel Perusahaan	48
	Jumlah Sampel (48 x 3 Tahun)	144

Sumber: Data Penelitian, 2024

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menguji agresivitas pajak sebagai variabel dependen, kemudian thin capitalization dan koneksi politik sebagai variabel independen, dan kepemilikan

institusional sebagai variabel moderasi. Definisi operasional dari setiap variabel dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Agresivitas Pajak	$ETR = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre-Tax Income}}$	(Lestari Yuli Prastyatini & Yesti Trivita, 2022; Rusli, 2021)
Thin Capitalization	$\text{Thin Capitalization Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Ekuitas}}$	(Arifah & Arieftiara, 2021)
Koneksi Politik	Koneksi politik diukur dengan menggunakan skala dummy, di mana nilai 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki koneksi politik dan nilai 0 menunjukkan sebaliknya.	(Krisnawati et al., 2021).
Kepemilikan Institusional	$KI_{i,t} = \frac{\sum \text{saham institusi}_{i,t}}{\sum \text{saham beredar}_{i,t}}$	(Prastiwi & Walidah, 2020)

Sumber: Data Penelitian, 2024

Pada penelitian ini, data dianalisis dengan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan *software eviews* 12 sebagai alat analisis data. Tahapan analisis meliputi beberapa uji, antara lain: analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model yang mencakup Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange multiplier (LM), Uji Asumsi Klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastitistas dan uji autokorelasi. Selain itu, dilakukan pengujian hipotesis, analisis koefisien determinasi, serta penerapan MRA menggunakan model persamaan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terhadap 87 perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI mulai periode 2021-2023, yang terdaftar 15 perusahaan yang mengalami kerugian. Menurut Yuliani et al, (2021) sistem eliminasi sebaiknya dilakukan terhadap perusahaan yang mengalami kerugian, hal tersebut menyebabkan gangguan data dan menghasilkan nilai yang terdistorsi. Sebanyak 37 perusahaan digunakan sebagai sampel data dalam penelitian ini. 24 dari keseluruhan sampel tidak mempublikasikan laporan keuangan dan 11 data outlier yang dihapus karena dapat mengganggu proses pengujian.

Descriptive Statistics

Tabel 3. Uji Deskriptif Statistik

Variabel	OBS	Mean	Std. Dev	Min	Max
TC	111	2888.527	2177.662	94.00000	9429.000

KP	111	5545.455	4992.906	0.00000	10000.00
AP	111	-1650.409	2545.634	-9085.000	5257.000
KI	111	2536.364	1376.594	457.0000	9001.000

Sumber: Data Penelitian, 2024

Analisis deskriptif dari 111 observasi menunjukkan bahwa *thin capitalization* berkisar antara 94.00 hingga 9429.00 dengan rata-rata 2888.527 (std. deviasi 2177.662). Koneksi politik memiliki rentang 0.00 sampai 10000.00, rata-rata 5545.455 (std. deviasi 4992.906). Agresivitas pajak berada pada rentang -9085.00 hingga 5257.00 dengan rata-rata -1650.409 (std. deviasi 2545.634), sedangkan kepemilikan institusional berkisar dari 457.00 sampai 9001.00 dengan rata-rata 2536.364 (std. deviasi 1376.594). Sebaran data *thin capitalization* dan kepemilikan institusional bersifat homogen karena rata-ratanya melebihi standar deviasi. Sebaliknya, koneksi politik dan agresivitas pajak memiliki sebaran heterogen dengan standar deviasi yang lebih besar dari rata-ratanya.

Uji Pemilihan Model

Model *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) dilibatkan dalam regresi data panel. Dalam penelitian ini, peneliti memilih model terbaik dengan melaksanakan serangkaian pengujian, yaitu uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* (LM).

Tabel 4. Pemilihan Model

Model spesification	Statistics	P-Value	Model
Chow test	Chi-square Prob	0.0000	Fix Effect
Hausmant test	Prob Random cross-section	0.0107	Fix Effect
LM test	Prob Cross-section	0.0000	Random Effect

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan serangkain pengujian model, *Fixed Effect Model* terpilih sebagai model terbaik untuk penelitian ini. Keputusan ini didukung oleh uji *Chow* (p-value $0.0000 < 0,05$) yang menunjukkan keunggulan *Fixed Effect Model* dibanding *Common Effect Model*, serta uji *Hausman* (p-value $0.0107 < 0.05$) yang mengonfirmasi bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat dibandingkan *Random Effect Model*. Walaupun uji *LM Test* (p-value $0.0000 < 0,05$) mengarah pada *Random Effect Model* sebagai pilihan yang lebih baik dari *Common Effect Model*, hasil uji *Chow* dan *Hausman* yang signifikan menegaskan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan pilihan yang paling sesuai untuk analisis data panel dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi digunakan untuk uji asumsi. Uji normalitas yang digunakan ialah *Jarque-*

Bera dengan nilai Jarque-bera sebesar 2.2957565, dengan hal tersebut maka data dapat diinterpretasikan sebagai data dengan distribusi normal. Uji multikolinieritas dilakukan dengan menganalisis matriks koefisien korelasi x_1 dan x_2 sebesar -0.336005, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel independen adalah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lolos uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dilihat dari nilai Durbin-Watson sebesar 2.078739. Penentuan nilai "du" dapat ditemukan dalam tabel Durbin Watson (DW), dengan taraf signifikansi 5%. Penelitian ini memanfaatkan 37 data ($n=37$) dengan 3 variabel independen ($k=3$), sehingga diperoleh nilai "du" sebesar 1.3635. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai "d" berada di antara "du" dan $4 \cdot \text{"du"}$, yaitu $1.5904 < 2.0787 < 2.4096$, menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam data.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	t-Statistics	Prob
C	-5383.230	-3.938442	0.0002
X1	0.152874	0.703672	0.4840
X2	0.694313	4.254295	0.0001
M	-0.177256	-0.532043	0.5964
X1M	0.807419	0.814721	0.4180
X2M	-1.857708	-2.550309	0.0130

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan *thin capitalization* (X1) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dengan koefisien 0,152874 dan p-value 0,4840. Koneksi politik (X2) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak, dengan koefisien 0,694313 dan p-value 0,0001. Kepemilikan institusional (M) tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan, dengan koefisien -0,177256 dan p-value 0,5964. Namun, interaksi antara *thin capitalization* dan kepemilikan institusional (X1M) tidak menunjukkan hasil yang signifikan, dengan koefisien 0,807419 dan p-value 0,4180. Sebaliknya, interaksi antara koneksi politik dan kepemilikan institusional (X2M) menunjukkan pengaruh signifikan dengan koefisien negatif -1,857708 dan p-value 0,0130.

Pembahasan

Thin capitalization (X1) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan dalam sampel. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kepatuhan perusahaan terhadap batas rasio utang terhadap modal yang diatur

dalam PMK No. 169/PMK.010/2015 (Cahyani et al., 2021). Ketidaksignifikanan *thin capitalization* dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh aturan yang lebih ketat di Indonesia, seperti regulasi Pasal 18 ayat (1) UU Pajak Penghasilan tentang batas rasio utang terhadap modal (Sumekar et al., 2023). Terdapat hasil yang bertentangan dengan penelitian lainnya. Ketidaksignifikanan *thin capitalization* dalam penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Rahmadhani & Lastanti, 2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan utang sering kali digunakan untuk mengurangi pajak secara agresif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh regulasi ketat mengenai rasio utang terhadap modal di Indonesia, yang membatasi ruang gerak perusahaan dalam praktik ini.

Koneksi politik (X2) berhubungan positif dengan agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung mendapatkan perlakuan istimewa, seperti penurunan risiko audit dan akses ke kebijakan fiskal strategis. Hal ini meningkatkan keberanian perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agresif (Rudyanto et al., 2023). Hasil ini sesuai dengan konsep dasar yang menyebutkan bahwa koneksi politik memberi akses khusus kepada perusahaan dalam perencanaan pajak, seperti akses terhadap kebijakan fiskal yang fleksibel atau penurunan risiko audit (Ajili & Khlif, 2020).

Kepemilikan institusional (M) berfungsi sebagai moderator, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka hak suara investor semakin besar dalam pengawasan dan memberikan dorongan, sesuai dengan penelitian (Putri, 2019), kepemilikan institusional terbukti sebagai moderasi dapat melemahkan pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak dengan efek signifikan negatif dalam hubungan koneksi politik dan agresivitas pajak (X2M). Hal ini menunjukkan bahwa institusi cenderung memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan koneksi politik untuk melakukan agresivitas pajak (Rustiarini & Sudiartana, 2021).

Sebaliknya, interaksi antara *thin capitalization* dan kepemilikan institusional (X1M) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional belum mampu memoderasi hubungan antara *thin capitalization* dan agresivitas pajak. Temuan ini berbeda dengan penelitian (Widadi et al., 2022) yang menemukan bahwa moderasi kepemilikan institusional pada *thin capitalization* berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh variasi sektor industri atau periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian (Ajili & Khlif, 2020; Solikin & Slamet, 2022) yang mengungkapkan bahwa koneksi politik memberikan keuntungan berupa akses terhadap kebijakan pajak yang menguntungkan dan pengurangan risiko audit. Moderasi kepemilikan institusional terhadap hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak juga sejalan dengan penelitian (Amaliyah & Nurdin, 2024;

Firmansyah et al., 2022), yang menunjukkan bahwa institusi dapat membatasi pengaruh negatif dari koneksi politik melalui pengawasan ketat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara *thin capitalization* tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung lebih berani dalam merencanakan strategi penghindaran pajak karena adanya perlindungan dari hubungan politik. Namun, regulasi yang ketat, seperti yang diatur dalam PMK No. 169/PMK.010/2015, membatasi pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Selain itu, kepemilikan institusional terbukti dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak, memberikan pengaruh negatif yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan institusional dapat mengurangi dampak negatif dari koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan berkaitan dengan rentang waktu periode observasi yang terbatas hanya tiga tahun (2021-2023) dengan objek penelitian terbatas hanya pada perusahaan sektor *energy*. Penentuan proksi untuk variabel koneksi politik dilakukan berdasarkan informasi dari laporan tahunan perusahaan dan publikasi di internet, mengingat keterbatasan data yang ada. Untuk meningkatkan validitas informasi di masa mendatang, disarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan wawancara langsung dengan perusahaan atau menggunakan sumber data tambahan lainnya. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak dan faktor-faktor lain yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penghindaran pajak serta memperkuat implementasi aturan rasio utang terhadap modal guna membatasi praktik *thin capitalization*. Perusahaan diharapkan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan untuk meminimalkan risiko audit dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sektor industri, memperpanjang periode pengamatan, serta mempertimbangan variabel lain, seperti *Green Innovation / Sustainability Orientation*, untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajili, H., & Khelif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from

- Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812.
<https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Amaliyah, A., & Nurdin, F. (2024). Apakah Kepemilikan Institusional Dapat Memoderasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak? *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 105–124.
<https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i1.503>
- Arifah, Y., & Arieftiara, D. (2021). The Effect of Thin Capitalization and Capital Intensity on Tax Avoidance with Institutional Ownership as Moderating Variables. *Proceeding of The 1st Jakarta Economic Sustainable International Conference Agenda (JESICA)*, 113–128.
- Aysha, N. S., & Sari, S. P. (2022). Executive Character Sustainability, Thin Capitalization, Political Connection, and Audit Quality on Tax Avoidance. *The International Journal of Business Management and Technology*, 6(4), 261–269.
www.theijbmt.com
- Ayuningtia, M., & Pramiana, O. (2024). The Influence of Thin Capitalization, Capital Intensity and Sales Growth on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variable in Manufacturing Companies Registered as Indonesian Sharia Stock Index Companies. *International Journal of Pertapsi*, 2(2), 58–68.
<https://doi.org/10.9744/ijp.2.2.58-68>
- Cahyani, A. Z., Djaddang, S., & Sihite, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Tax Avoidance 2017-2019. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 122–135.
- Devriadi, F. S., & Achyani, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Dan Beban Pajak Tanggungan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Good Corporate Governance Pada Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2237–2250.
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63–93. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.17313>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Maburur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Hasmawati, Wuri Handayani, E. S. (2020). Analisis Agresivitas Pajak Sebelum Dan Setelah Kebijakan Pengampunan Pajak Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(1), 1–15.
<https://doi.org/10.22146/abis.v7i1.58825>

- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap> Jurnal
- Hermi, H., & Petrawati, P. (2023). the Effect of Management Compensation, Thin Capitalization and Sales Growth on Tax Avoidance With Institutional Ownership As Moderation. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.16790>
- Julianti, J., & Ruslim, H. (2023). The Influence of Capital Intensity and Thin Capitalization on Tax Avoidance Moderated by Profitability. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(10), 3373–3381. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i10.594>
- Krisnawati, R., Fionasari, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity dan Corporate Social Responbility terhadap Agresivitas Pajak. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 84–92.
- Kurniawati, D., & Mukti, A. H. (2023). Effect Of Thin Capitalization, Capital Intensity On Tax Avoidance With Institutional Ownership Moderating Variable. *Governors*, 2(1), 19–25. <https://doi.org/10.47709/governors.v2i1.2021>
- Lestari Yuli Prastyatini, S., & Yesti Trivita, M. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 943–959. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1419>
- Mayangsari, S. R., Rusydi, M. K., Amirya, M., & Brawijaya, U. (2024). *J r a k*. 14(03), 570–585. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i3.35509>
- Mohammad Aryo. (2020). 34 Aryo Arifin Agresivitas Pajak Sektor Pertambangan Indonesia Mohammad Aryo Arifin 1. 34–49.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nurfalah, S., Tresno Eka Jaya R, & Rida Prihatni. (2024). Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(3), 770–784. <https://doi.org/10.21009/japa.0403.10>
- Olivia Lucky, G., & Murtanto, M. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Capital Intesity dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating Terhadap Tax Avoidance. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(4), 950–965. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i4.355>
- Pramesti, W. C., & Laili, T. F. (2024). Peran Moderasi Koneksi Politik dalam Pengaruh Multinasionalitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(2), 200–210. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i2.31579>

- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Prastiwi, D., & Walidah, A. N. (2020). Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan: Efek moderasi transparansi dan kepemilikan institusional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 203–224. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.2997>
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82–90. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>
- Putri, V. R. (2019). Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.35384/jemp.v4i1.119>
- Rahmadhani, G., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Instutisional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 5(1), 35–47.
- Reichl, C., & Schatz, M. (2021). World Mining Data 2021. In *Minerals Production* (Vol. 36). https://www.world-mining-data.info/?World_Mining_Data__PDF-Files
- Riswandari, E., & Bagaskara, K. (2020). Agresivitas Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, Leverage Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 261–274. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.261-274>
- Rudyanto, A., Julisar, J., & Debora, D. (2023). Political connection as a double-edged sword: the case of tax aggressiveness practice during the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(4), 400–410. <https://doi.org/10.1108/AJAR-04-2023-0113>
- Rusli, Y. M. (2021). Agresivitas Perpajakan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Negara Indonesia Dan Malaysia Yang Dimoderasi Oleh Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 176–195. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4213>
- Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2021). *Board Political Connection and Tax Avoidance : Ownership Structure as A Moderating Variable*. 8(2), 128–144.
- Satiti, A. D. R., Syafik, M., & Widarjo, W. (2021). Political Connections and Tax Aggressiveness: the Role of Gender Diversity As a Moderating Variable. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 273–292. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9794>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Sumekar, D. R., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 7 No 12 (2025) 4346 – 4361 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i12.10238

Avoidance Pada Perusahaan Sektor Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4533-4541.
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Sunarana, S., & Hermawan, A. (2022). *The Effect of Sales growth, Profit Management, and Capital Intensity on Tax Avoidance*. ECOSIA.

Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386-399.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>

Widadi, F. A., Subroto, B., & Rahman, A. F. (2022). Tax Avoidance Mediated by Constitutional Ownership as Moderating Variables. *Etikonomi*, 21(2), 411-430.
<https://doi.org/10.15408/etk.v21i2.25799>

Yuliani, N. A., Prastiwi, D., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141-148.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>. Copyright